

GERAKAN ANTI PEMBAKARAN TIMAH
(Studi Kasus Gerakan Sosial pada Masyarakat Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan dalam Menolak Aktivitas Pembakaran Timah)

Eko Cahyo R.A.
0811210033

ABSTRAK

Lamongan memiliki permasalahan lingkungan yang cukup serius yaitu berupa pencemaran atau polusi udara yang diakibatkan oleh asap timah. Asap timah tersebut muncul akibat hasil pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok pengusaha peleburan timah di Kecamatan Pucuk yang mana daerah tersebut berbatasan langsung dengan Kecamatan Sekaran. Hasil pembakaran berupa polusi asap timah sering mengarah ke Wilayah Sekaran yang dianggap mengganggu kesehatan dan kualitas udara di wilayah tersebut. Dari permasalahan ini muncul aktivitas masyarakat Sekaran berupa gerakan sosial yang tujuannya menolak aktivitas pembakaran timah tersebut.

Peneliti menggunakan teori mobilisasi sumber daya yang digagas John D. McCarthy dan Mayer N. Zald untuk menganalisa dinamika gerakan sosial masyarakat Sekaran dalam menolak aktivitas pembakaran timah. Teori tersebut menekankan pentingnya organisasi gerakan sosial dan rasionalitas aktor dalam memobilisasi sumber daya yang tersedia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi kasus. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti berusaha memahami latar atau setting alamiah subjek yang menjadi kajian penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, organisasi gerakan, kepemimpinan, strategi dan ideologi memainkan peran penting dalam memobilisasi sumber daya serta mendistribusikan untuk kepentingan dan tujuan gerakan. Terdapat dua kelompok gerakan yang berkembang di Kecamatan Sekaran. Secara garis besar kelompok gerakan tersebut memobilisasi warga untuk melakukan tekanan kepada pemerintah agar mengatasi permasalahan polusi asap timah.

Kata Kunci : Gerakan Sosial, Mobilisasi Sumber Daya, Pembakaran Timah, Organisasi

ABSTRACT

Nowadays, Lamongan has a serious environmental problem through air pollution caused by tin smoke. This smoke appeared due to the results of combustion done by a group of Pucuk Sub-district businessmen toward smelting tin which the area is bordered by sub-district called Sekaran. As a result, the smoke pollution caused by this combustion often leads to the sub-district nearest neighbor included Sekaran in which proceed of disturbing health and the air quality in the region. This problem raised a social movement who opposed the activity tin combustion.

Mobilization theory held by John D. McCarthy and Mayer N. Zald was used to analyze the social movement from Sekaran people in refusing the activity of tin combustion. The theory emphasizes the importance of the organization of social movement and the rationality of the actors in mobilizing the provided resources. This research used qualitative method with case study as the approach. By using case study, the researcher attempted to understand the background or natural setting of the subject of the research.

Based on the research, movement organization, leadership, strategy and ideology played important roles in mobilizing the resources, yet distributing for the organization's importance and purposes. There were two movement organization developed in Sekaran. Those organization mobilized the people to push the government to solve the tin smoke pollution problem

Keywords : Social Movements, Resource Mobilization, Tin-Combustion, Organization

A. POLUSI ASAP TIMAH DAN MUNCULNYA GERAKAN ANTI PEMBAKARAN TIMAH

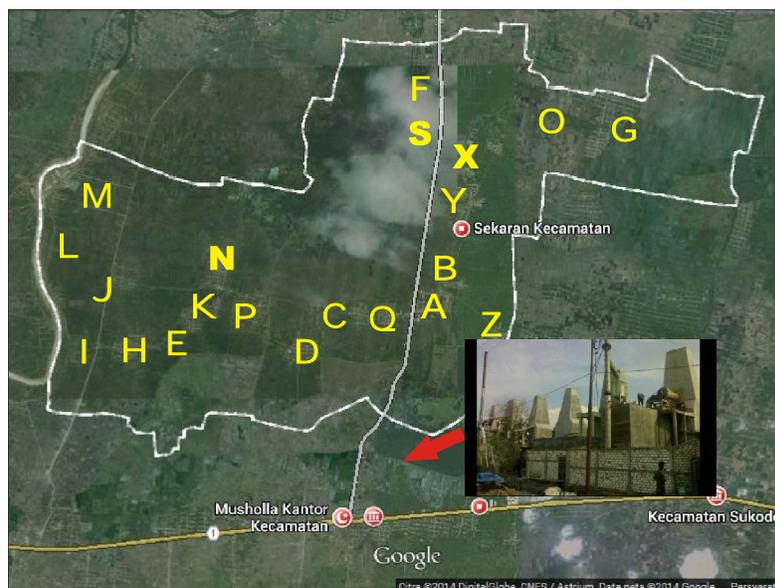
Krisis lingkungan yang diakibatkan oleh industri tidak ramah lingkungan saat ini telah merambah daerah yang bahkan tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri. Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Lamongan tepatnya di Kecamatan Sekaran. Di wilayah tersebut terjadi sebuah krisis pencemaran lingkungan berupa polusi udara yang diakibatkan oleh asap timah. Asap timah yang mencemari Kecamatan Sekaran bersumber dari aktivitas pembakaran timah yang dilakukan oleh kelompok usaha timah yang lokasinya justru berada di Kecamatan Pucuk. Kecamatan Pucuk merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sekaran atau lebih tepatnya berada di Sebelah Selatan Kecamatan Sekaran.

Pada awalnya, kegiatan pembakaran timah merupakan usaha yang dilakukan perorangan yang letaknya tersebar di pinggir-pinggir jalan sekitar kawasan Pucuk dan Sekaran. Proses kegiatan usaha peleburan timah ini berlangsung sejak tahun 1990an. Industri pembakaran timah umumnya dilakukan dengan skala industri rumah tangga kecil dan menengah yang tersebar diberbagai tempat dan biasanya dilakukan di tempat-tempat terpencil. Industri kecil dan menengah dianggap lebih menguntungkan dibanding dengan melakukannya melalui industri bersekala besar karena biaya pada industri skala menengah besar memerlukan biaya mobilisasi yang tinggi untuk memenuhi *break even point* (BEP) sehingga dirasakan akan lebih menguntungkan untuk mengambil produk setengah jadi dari industri kecil

untuk selanjutnya diolah menjadi produk murni (Bayuseno, 2009, hlm. 15). Pembakaran timah apabila tidak dilakukan dengan teknologi yang tepat akan berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan baik dalam proses pengumpulan, pengangkutan maupun pembakarannya. Adapun pencemaran yang dapat ditimbulkan dari industri ini pertama yaitu pencemaran udara yang berasal dari asap dan debu yang mengandung logam berat (*Pb*). Kedua, bau sulfur yang spesifik dan ketiga limbah cair yang mengandung asam sulfat (Bayuseno, 2009, hlm. 15).

Kecamatan Sekaran merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lamongan yang membawahi 21 desa dan 29 dusun. Di sebelah Utara Kecamatan Sekaran berbatasan langsung dengan Kecamatan Maduran. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pucuk. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pucuk dan Karanggeneng. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tuban. Keseluruhan desa di Kecamatan Sekaran berada dikawasan persawahan. Di bidang industri, Kecamatan Sekaran ditujukan sebagai kawasan industri skala kecil menengah. Adapun peta persebaran desa di Kecamatan Sekaran ditunjukkan gambar dibawah ini berikut lokasi kegiatan pembakaran timah saat ini:

Gambar 1. Peta Persebaran Desa dan Lokasi Pembakaran Timah.¹



¹ Untuk alasan keamanan para informan, penulis tidak merinci nama-nama desa secara spesifik dan mengganti dengan huruf alfabet.

Sumber: Google Maps dan Kabarone.com

Di era tahun 1990an Kecamatan Sekaran juga terdapat industri pembakaran timah yang dilakukan oleh warga Desa Q sebut saja bernama H. Zaid. Sejak pertama kali H. Zaid membuka usaha pembakaran timah, warga dari beberapa desa di Kecamatan Sekaran telah melakukan protes kepada pengusaha agar menghentikan dan merelokasi ketempat yang tidak menimbulkan gangguan kepada warga. Hal ini dikarenakan aktivitas pembakaran timah H. Zaid dilakukan tanpa standar kerja yang memadai dan tanpa cerobong asap sehingga asap hasil pembakaran tersebut mencemari desa-desa disekitar kediaman H. Zaid. Menurut penuturan salah seorang informan desa-desa yang saat itu terlibat protes kegiatan pembakaran timah berasal dari enam desa, antara lain Desa A, B, C, H, D, dan Q. Protes warga yang pertama dilakukan dengan mendatangi langsung kediaman H.Zaid dan berhasil membuat pengusaha tersebut merelokasi tempat usaha menjauh dari pemukiman tepatnya di *Tekok* Desa D. Di daerah tersebut H. Zaid mulai membuat cerobong asap atau yang sering disebut dengan istilah *jubung* untuk mengendalikan asap hasil pembakaran. Namun karena produksi yang meningkat, asap hasil pembakaran kembali mencemari pemukiman warga sehingga protes warga pun kembali dilakukan dengan mendatangi langsung ke tempat pembakaran.

Pada tahun 2005 pemerintah daerah berinisiatif untuk melokalisir para pengusaha timah menjadi ke satu lokasi sehingga asap hasil pembakaran timah tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan warga. Dari berbagai pertimbangan akhirnya dipilihlah lokasi di Kecamatan Pucuk yang letaknya berada di tengah-tengah persawahan. Berawal dari hal ini pula para pengusaha timah membentuk sebuah koperasi yang mewadahi aktivitas pembakaran timah di wilayah tersebut. Nama koperasi sebut saja bernama KTM. Saat beroperasi di wilayah Pucuk, jumlah *Jubung* mengalami peningkatan. Banyak pengusaha timah dari Kecamatan Pucuk maupun dari luar ikut dalam usaha peleburan timah ini. Akibatnya, asap yang dihasilkan semakin tidak terkendali walaupun tempat relokasi semakin menjauh dari pemukiman warga Kecamatan Sekaran. Aksi Penolakanpun kembali dilakukan warga.

Penolakan warga atas kegiatan pembakaran timah kembali dilakukan dengan target untuk berdemo secara langsung ke lokasi usaha KTM. Pada demo yang ketiga ini, warga yang terganggu berusaha mendatangi lokasi yang baru dengan cara bejalan kaki jaraknya kurang lebih tiga kilometer dari lokasi pembakaran timah pada waktu awal. Pergerakan massa yang cukup jauh membuat aksi tersebut dihadang oleh aparat Polres Lamongan yang didasarkan pada informasi intelijen setempat. Akhirnya sebelum massa sampai di lokasi pembakaran timah aparat Polres sudah menghadang dan melakukan mediasi dengan warga saat itu juga. Dalam mediasi tersebut warga berhasil ditenangkan oleh aparat sehingga kemungkinan terjadinya rusuh tidak terjadi.

Beberapa hari setelah warga berhasil ditenangkan, KTM memulai aksi premanisme. Aksi premanisme dilakukan dengan menyuruh sejumlah orang bayaran untuk mengintimidasi sejumlah aktor penggerak demo tolak pembakaran timah. Isu adanya premanisme tersebut akhirnya berkembang dimasyarakat sehingga masyarakat yang antusias menolak aktivitas pembakaran timah tidak lagi berani melakukan protes maupun demonstrasi. Pihak KTM saat itu juga mulai memberikan sejumlah sumbangan ke masjid-masjid dan warga desa yang terkena imbas pembakaran timah sehingga warga semakin enggan untuk melakukan penolakan. Keberhasilan KTM dalam usaha pembakaran timah juga menarik sejumlah orang untuk ikut dalam usaha ini sehingga di Kecamatan Pucuk muncul kelompok pengusaha baru sebut saja bernama KSR. Hingga saat ini jumlah *Jubung* timah yang dibawah naungan KTM berjumlah 15 *Jubung* sedangkan KSR berjumlah 5 *Jubung*.²

Aktivitas Pembakaran timah sering kali dilakukan pada malam hari. Ada beberapa wilayah yang terkena imbas dari proses pembakaran timah ini. Di antaranya Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Sukodadi, dan Kecamatan Maduran. Dari keempat kecamatan tersebut, Kecamatan Sekaran

² Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, KTM merupakan kelompok pengusaha yang memiliki izin lingkungan (keputusan kelayakan lingkungan) dari Bupati Lamongan, Izin Ho dan izin IMB pada tahun 2005. Sedangkan untuk KSR tidak mengantongi izin apaun. Walaupun telah mengantongi izin tersebut, banyak warga melihat bahwa kegiatan pembakaran timah tidak dilakukan secara memadai dan dilakukan diluar tungku pembakaran yang berakibat semakin tidak terkendalinya asap hasil pembakaran. Menurut penuturan pihak pengusaha, pembakaran tidak dilakukan karena tidak adanya pasokan listrik yang mampu mendukung beroperasinya *dust collector*.

merupakan wilayah dengan intensitas pencemaran udara yang paling sering. Hal ini dikarenakan lokasi pembakaran timah berada tepat di perbatasan antara Kecamatan Pucuk dan Sekaran. Secara geografis, angin pada malam hari akan cenderung bertiup ke arah utara dimana wilayah tersebut adalah wilayah Kecamatan Sekaran dan Maduran. Selain itu, jika pada saat angin bertiup ke sebelah selatan atau tepatnya mengarah ke wilayah Pucuk, maka proses pembakaran timah akan dihentikan. Penghentian aktivitas pembakaran timah jika sewaktu-waktu angin bertiup ke wilayah selatan diduga dikarenakan terdapat aksi penolakan dari warga Pucuk juga mayoritas pemilik dan pekerja banyak tinggal di wilayah tersebut yang tidak mau wilayah mereka tercemar akibat asap timah. Selain itu, penghentian aktivitas pembakaran timah dihentikan karena jika asap berhembus ke wilayah selatan akan membahayakan para pengendara di Jalan Provinsi.

Saat berlangsungnya aktivitas pembakaran timah, warga Kecamatan Sekaran umumnya mencium bau sulfur dari hasil pembakaran tersebut. Jarak pandang warga juga terganggu akibat asap timah yang pekat serta dirasa sangat membahayakan pengendara pada malam hari. Selain itu, beberapa warga juga mengaku pusing dan sesak nafas setiap kali asap timah mencemari wilayah mereka. Masyarakat Kecamatan Sekaran yang merasakan dampak dari aktivitas peleburan timah kemudian membuat kelompok gerakan sosial yang bertujuan untuk menangani masalah ini. Salah satu alasan mengapa harus dibentuk sebuah kelompok gerakan sosial dikarenakan selama berdirinya KTM dan KSR, belum ada aktivitas dan organisasi yang solid dalam membangun gerakan penolakan. Nama dari forum ini adalah Forum Komunikasi Warga Tolak Pembakaran Timah (FKWTPT) dan Gerakan Sehat Tanpa Asap Timah (GSTAT). Kedua forum ini dibentuk pada tahun 2011. Pada awal pembentukan, kedua organisasi gerakan ini berdiri sendiri-sendiri dan melakukan gerakan secara terpisah. Namun setelah mengadakan pertemuan dan komunikasi, kedua organisasi ini bersepakat untuk berintegrasi karena memiliki ideologi dan tujuan yang sama yakni mengatasi masalah lingkungan dan kesehatan. Organisasi ini dibentuk dikarenakan meningkatnya kadar polusi udara yang dirasakan sangat mengganggu warga akibat dari aktivitas peleburan timah. Hal yang membedakan antara gerakan

penolakan yang lama dengan kelompok gerakan sosial ini adalah massa yang tergabung didalamnya. Jika massa pada gerakan lama berasal dari desa A,B,C,D,Q maka kelompok ini membentuk jaringan anggota dari Desa X, Y, Z dan beberapa warga Desa Q serta memiliki simpatisan dari desa-desa di Kecamatan Sekaran yang letaknya di sebelah utara. Hal ini dikarenakan imbas dari polusi asap timah yang dulu hanya mencemari kawasan A,B,C,D dan Q saat ini asap tersebut telah merambah hingga desa-desa di wilayah utara Kecamatan Sekaran. Perbedaan ini juga dikarenakan aksi premanisme dan sumbangan dari pengusaha sehingga menyurutkan nyali warga yang sebenarnya terganggu dengan asap timah tersebut. selain itu

Dari uraian tersebut, penulis mencoba menguraikan bagaimana dinamika gerakan sosial yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Warga Tolak Pembakaran timah (FKWTPT) dan Gerakan Sehat Tanpa Asap Timah (GSTAT) dalam menolak Aktivitas Pembakaran Timah?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan karena disinilah muncul aktivitas gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat beserta organisasinya. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama melalui observasi atau pengamatan yang mana hal yang menjadi fokus observasi adalah perilaku aktor dan masyarakat selama menjalankan aktivitas gerakan sosial. Kedua melalui wawancara, wawancara ini merupakan sesi tanya jawab kepada informan untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas gerakan sosial. Wawancara yang dilakukan penulis bertipe *open ended* dikarenakan penulis ingin mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya melalui peran informan kunci. Selain itu, wawancara tersebut dilakukan agar informan tidak merasa canggung ketika wawancara berlangsung. Perasaan canggung kemungkinan muncul mengingat isu yang akan diteliti merupakan isu sensitif yang mana dalam kasus gerakan sosial, aktor-aktor gerakan biasanya enggan membuka informasi kepada orang lain. Penulis juga menyamarkan nama-nama informan dalam penelitian ini untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan para informan dengan mengganti nama asli mereka (*pseudonym*). Ketiga melalui dokumen kualitatif. Penggunaan dokumen kualitatif

dilakukan untuk mendukung dan memperkuat informasi selama penelitian berlangsung.

B. GERAKAN SOSIAL DAN TEORI MOBILISASI SUMBER DAYA (TMSD)

Ada beberapa konsep dan definisi yang dikemukakan oleh para tokoh gerakan sosial. Gerakan sosial dapat diartikan sebagai suatu bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama (Triwibowo, 2006, hlm. xv). Giddens (1993) mendefinisikan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan (Suharko, 2006, hlm. 3). John D. McCarthy dan Mayer Zald mendefinisikan gerakan sosial sebagai upaya terorganisasi untuk mengadakan perubahan di dalam distribusi hal-hal apapun yang bernilai rasional (Wictorowicz, 2012, hlm. 4).

Untuk menganalisa dinamika gerakan sosial yang terjadi di Kecamatan Sekaran penulis menggunakan teori mobilisasi sumberdaya sebagai pisau analisis. Teori mobilisasi sumber daya (TMSD) pertama kali muncul di Amerika sebagai respon atas teori gerakan sosial terdahulu khususnya teori gerakan sosial lama atau tradisional. Teori gerakan lama dianggap kurang memadai dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial yang berkembang saat ini. Menurut Oberschall dalam Locher (2002) Istilah mobilisasi sumber daya mengacu kepada proses pembentukan kerumunan atau kelompok, asosiasi, dan organisasi dalam rangka mencapai tujuan kolektif. Keputusan untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial dipandang bukan sebagai konsekuensi dari sifat-sifat predisposisi psikologis, tetapi sebagai hasil proses-proses keputusan rasional yang mana orang tersebut memperhitungkan keuntungan dan kerugian dalam keterlibatannya dalam gerakan sosial (Sukmana, 2013, hlm. 42).

McCarthy dan Zald (1977) menjelaskan awal mula perkembangan dari gerakan lama sehingga memunculkan paradigma mobilisasi sumber daya; *Pertama*, dilihat dari basis struktur. Gerakan sosial lama melihat kelompok

masyarakat yang dirugikan merupakan sumber daya dan tenaga kerja yang diperlukan bagi kemunculan gerakan sosial. Walaupun pada dasarnya kemunculan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor eksternal namun hal ini belum menjadi analisa gerakan tradisional. Dalam hal ini, perpektif yang ditawarkan oleh TMSD, gerakan sosial tidak lahir hanya karena adanya keluhan, tetapi pada aspek manfaat yang didapatkan jika gerakan sosial dilakukan. Individu dan organisasi-organisasi penerima manfaat tersebut dapat menjadi sumber daya utama untuk meraih dukungan. Dalam beberapa kasus, simpatisan gerakan dapat menyediakan sumber daya lain seperti uang, fasilitas dan tenaga kerja (Zald & McCarthy, 1977, hlm. 1216).

Kedua, dilihat dari taktik dan strategi gerakan. Gerakan sosial tradisional melihat taktik yang digunakan oleh pemimpin gerakan sosial dalam mencapai gerakan sosial dilakukan dengan cara-cara tawar-menawar, persuasif, dan bahkan kekerasan untuk mempengaruhi pemangku kebijakan. Pemilihan taktik didasarkan pada pertemuan dengan pemerintah atau pemangku kebijakan, keberhasilan pada pertemuan sebelumnya dan ideologi. Taktik juga dipengaruhi oleh keadaan oligarki dalam kehidupan berorganisasi. Taktik dalam perspektif mobilisasi sumber daya memusatkan perhatian antara gerakan dengan pemilik otoritas. Tetapi hal yang perlu dipahami bahwa organisasi gerakan memiliki sejumlah tugas strategis seperti memobilisasi sumber daya dalam hal mempengaruhi massa dan elit sehingga mereka menjadi simpatisan dalam mencapai perubahan atau target dari gerakan sosial. Dilema kadang juga terjadi dalam hal pemilihan dan penggunaan taktik gerakan. Karena bukan tidak mungkin terjadi perbedaan pandangan antara orang-orang yang terlibat didalam gerakan dan kepentingan diluar gerakan. Selain itu, taktik juga dipengaruhi oleh persaingan antar organisasi dan kerjasama (Zald & McCarthy, 1977, hlm. 1217).

Ketiga, hubungan dengan masyarakat luas. Pandangan tradisional kurang memusatkan perhatian pada masyarakat luas. Mobilisasi sumber daya melihat adanya kesempatan untuk menggunakan infrastruktur yang ada dimasyarakat luas untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan gerakan. Hal ini seperti terlihat dengan pemanfaatan media komunikasi dan biaya, tingkat kemakmuran, akses ke pusat-

pusat kelembagaan, jaringan yang telah terbentuk sebelumnya serta struktur kerja dan pertumbuhan (Zald & McCarthy, 1977, hlm. 1217).

Berdasarkan pemaparan antara pandangan tradisional dan perspektif mobilisasi sumber daya, McCarthy mengungkapkan bahwa melalui struktur mobilisasi sumber daya adalah sejumlah kelompok gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif, termasuk di dalamnya terdapat strategi, strategi gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial (Situmorang, 2007, hlm. 7). Melalui analisa mobilisasi sumber daya ini pula dapat diketahui sejarah dan karakteristik gerakan sosial. TMSD memusatkan perhatiannya pada rasionalitas masyarakat dalam tindakan sosial atau gerakan sosial. Individu yang bergabung dalam gerakan sosial tidak hanya dipicu oleh kekecewaan yang menggerakkan tetapi melihat aspek kerugian dan manfaat yang akan didapatkan apabila memutuskan bergabung kedalam suatu gerakan.

Untuk itu analisa mobilisasi sumber daya selanjutnya tentang gerakan sosial dipusatkan pada organisasi gerakan sosial. Organisasi gerakan sosial sebagai salah satu pusat analisa dikarenakan terbentuknya organisasi gerakan merupakan hal mencirikan masyarakat gerakan memiliki rasionalitas dalam mencapai tujuan agar efektif dan efisien. Melalui organisasi, akan terlihat bagaimana masyarakat atau konstituen tersebut memobilisasi sumber daya secara lebih canggih, baik dari segi karakteristik, model bahkan bentuk gerakan pada masyarakat kontemporer (Rusmanto, 2013, hlm. 34). Dari hal tersebut dapat diketahui karakteristik dan tipe keterlibatan orang yang dibedakan antara penganut (anggota tetap dan peserta), Konstituensi (Sumber dari Sumber daya), dan para pencari keuntungan yang untuk selanjutnya elemen ini dapat dimobilisasi dalam bentuk dan strategi gerakan sosial (Rusmanto, 2013, hlm. 66).

Berdasarkan ulasan TMSD, pembentukan kelompok FKWTPT dan GSTAT merupakan hasil dari rasionalisasi aktor yang terlibat didalamnya. Melalui FKWTPT dan GSTAT masyarakat Sekaran mencoba mengorganisir melalui kelompok gerakan sosial untuk dapat melakukan perubahan terkait polusi asap timah. Melalui organisasi gerakan, pemimpin dan kaum profesional gerakan memobilisasi sumber-sumber daya yang dibutuhkan bagi keberlangsungan organisasi gerakan. Adapun struktur mobilisasi sumber daya dapat dibedakan

antara formal maupun informal. Struktur mobilisasi juga memasukkan serangkaian posisi-posisi sosial dalam kehidupan sehari-hari dalam struktur mobilisasi mikro yang tujuannya adalah mencari lokasi-lokasi di dalam masyarakat yang dapat dimobilisasi (Situmorang, 2007, hlm. 7).

Dalam sebuah organisasi gerakan agar mobilisasi dapat dilakukan dengan baik maka diperlukan peran pemimpin gerakan yang disebut dengan kaum profesional (*Movement Professional*). McCarthy dan Zald (1979,1987) mengutarakan bahwa pemimpin sebuah gerakan ini berfungsi sebagai pengelola sumber daya, merencanakan strategi, menghimpun dana, melakukan tekanan (*pressure*) terhadap kelompok elit dan mengadakan kontak dengan media massa (Rusmanto, 2013, hlm. 67). Pemimpin gerakan sosial biasanya menanggung risiko yang lebih besar dibanding dengan anggota biasa, namun biasanya juga seorang pemimpin akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula seperti prestis dikalangan masyarakat jika gerakan sosial berhasil.

Secara organisasional pemimpin gerakan memainkan taktik dan strategi yang bisa dimainkan untuk mengarahkan tujuan dari gerakan sosial. Strategi merupakan sejumlah cara untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan representasi dari hubungan antara maksud, aksi dan hasil. Strategi adalah skema kognitif yang merajut berbagai sumber daya dan taktik serta berupaya menjadikan kedua hal tersebut bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan yang diinginkan mudah dicapai (Ritzer, 2013, hlm. 901). Disinilah peran pemimpin dari FKWTPT dan GSTAT mendapatkan sorotan dalam penelitian ini karena terkait menentukan berhasil atau tidaknya gerakan anti pembakaran timah yang saat ini tengah dilakukan.

C. ORGANISASI KELUHAN MASYARAKAT KE DALAM ORGANISASI GERAKAN

Forum Komunikasi Warga Tolak Pembakaran Timah (FKWTPT)

Polusi asap timah yang mencemari kawasan Sekaran membuat resah sebagian warga yang berdomisili di kawasan tersebut. Keresahan warga dirasakan pada malam hari dengan mengeluhkan sesak nafas dan terganggunya aktivitas mereka pada malam hari. Dalam kondisi ini, muncul beberapa warga yang mencoba

menciptakan aktivitas gerakan sosial yang tujuannya adalah menentang kegiatan pembakaran timah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sebelum terbentuknya struktur, telah tersedia sumber daya dan fasilitas gerakan. Gagasan yang sudah ada sebelum membentuk struktur biasanya digunakan sebagai aset gerakan untuk membentuk keyakinan, ideologi, penentuan tujuan, pengenalan kawan dan lawan, dan visi misi kedepannya (Sztompka, 2008, hlm. 338). Artinya sebelum organisasi gerakan muncul, masyarakat sekaran telah memiliki ide untuk melakukan gerakan sosial dengan mengusung isu lingkungan dan kesehatan hanya saja belum tersedianya kepemimpinan efektif yang mampu mengorganisir sumber daya dan isu premanisme menjadi penghambat tumbuhnya gerakan sosial. Struktur mobilisasi sumber daya dalam membentuk organisasi gerakan melalui FKWTPT pada awalnya merupakan gagasan dari warga Desa X. Pada awalnya, warga Desa X mengeluhkan asap pembakaran timah kepada kepala desa mereka. Hal ini dilakukan agar kepala Desa X mengambil tindakan atas kondisi lingkungan yang terjadi di wilayah tersebut. Adalah Pak Imam seorang kepala Desa X yang mulai mengorganisir masyarakat ke dalam sebuah kelompok organisasi gerakan.

Banyaknya keluhan yang dirasakan warga menjadi perbincangan hampir setiap warga desa di Kecamatan Sekaran. Umumnya perbincangan warga terkait polusi asap timah dilakukan pada malam hari saat dimana asap timah mencemari kawasan Sekaran. Hal ini pula yang terjadi di Desa X, dimana perbincangan mengenai asap timah dilakukan di warung kopi termasuk salah satunya Pak Imam. Lokasi warung kopi Desa X yang strategis merupakan tempat bertemunya warga dari beberapa desa, disaat yang bersamaan muncul ide untuk mengorganisasi masyarakat melalui sebuah gerakan atau forum untuk mengakomodasi dan mencari solusi atas polusi asap timah. Hal ini dikarenakan polusi asap timah memiliki imbas ke desa desa lain. Salah satu warga yang turut menggagas terbentuknya FKWTPT adalah Mas Huda.

Mas Huda merupakan warga Desa Y yang berprofesi sebagai *bayan* atau Kaur di pemerintahan desa tersebut. Mas Huda seringkali *ngopi* pada malam hari diwarung kopi Desa X untuk sekedar melepas kepenatan. Rutinitas sebagian warga termasuk Mas Huda berupa aktivitas *ngopi* mempertemukan dengan Pak

Imam dan *Cak* Mukmin. *Cak* Mukmin ini disebut-sebut merupakan aktor lain yang tidak kalah penting dalam mengorganisir gerakan anti pembakaran. *Cak* mukmin sendiri merupakan warga Desa X yang berprofesi sebagai wartawan di salah satu media cetak dan *online* di Jakarta. *Cak* Mukmin inilah yang kemudian banyak mengambil peran besar sebagai fasilitator antara warga dengan Komnas HAM.

Perjumpaan yang terjadi membawa para aktor ke arah yang lebih rasional untuk melakukan perubahan yang terjadi pada lingkungan mereka. Dititik inilah muncul orang yang memiliki kepekaan dan kesadaran paling tajam terhadap isu sentral gerakan dan orang yang paling bertanggung jawab secara intelektual, emosional, moral dan politis terhadap timbulnya suatu gerakan sosial. Orang-orang tersebut berkeyakinan dan memperlakukan gerakan sebagai alat untuk mencapai perubahan yang diinginkan (Sztompka, 2008, hlm. 341). Pada tahap ini Pak Imam, Mas Huda dan *Cak* Mukmin melihat ketersediaan sumber daya berupa keluhan dari warga Desa X dan Y sebagai warga yang bisa dimobilisasi sehingga ide maupun kepercayaan tentang harapan dan protes dapat diinstitusionalisasi melalui organisasi gerakan. Mereka inilah yang juga disebut kaum profesional gerakan dikarenakan komitmen untuk mencurahkan waktu, tenaga kerja, dan biaya untuk kepentingan gerakan.

Perkembangan selanjutnya yang dapat dilihat dari dinamika organisasi gerakan FKWTPT selain kesadaran dan kepekaan terhadap isu sentral adalah munculnya pemimpin gerakan. Menurut Henslin (2006) Pemimpin gerakan inilah orang yang mampu menterjemahkan perasaan orang-orang ke dalam bentuk wacana dan menyelesaikan isu-isu (hlm. 231). Untuk itulah FKWTPT, menunjuk Pak Imam sebagai pemimpin gerakan dikarenakan peran Pak Imam di masyarakat sebagai kepala desa sehingga dianggap mampu menterjemahkan keluhan warganya terkait dampak polusi asap timah kepada pihak yang paling bertanggung jawab. Dengan adanya sumber daya berupa tenaga kerja, FKWTPT juga mengorganisir secara formal yang artinya FKWTPT memiliki struktur organisasi yang terstruktur. Selain adanya ketua yang dipimpin oleh Pak Imam, juga ada sekretaris yang dipegang oleh Mas Huda. Sekretaris ini pada tahapan selanjutnya bertugas untuk mengirimkan pengaduan ke pihak pemerintah pusat

seperti Komnas HAM serta menghimpun berbagai keluhan dan surat-surat yang mendukung gerakan.

Untuk membentuk sebuah gerakan dalam menentang aktivitas pembakaran timah diperlukan pengorganisasian yang efektif agar sumber daya yang tersedia dapat disalurkan secara efektif melalui organisasi gerakan. Ketersediaan organisasi gerakan seperti forum komunikasi warga tolak pembakaran timah (FKWTPT) diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dapat mengkomunikasikan tentang dampak dan akibat polusi asap timah yang kemudian akan diteruskan ke pihak pemerintah.

Gerakan Sehat Tanpa Asap Timah (GSTAT)

Sama halnya yang terjadi di Desa X dan sekitarnya. Keluhan terhadap polusi asap timah juga terjadi di desa lain salah satunya di Desa Q. Warga atau lebih tepatnya pemuda Desa Q bernama Mas Deni kemudian mencoba mengorganisir keluhan tersebut kedalam organisasi gerakan yang dinamakan Gerakan Sehat Tanpa Asap Timah (GSTAT). Untuk mencari tenaga kerja suatu organisasi gerakan Mas Deni yang berlatar belakang sebagai anggota karang taruna mencoba memaparkan ide dan gagasan kepada anggota karang taruna. Namun mobilisasi dukungan melalui karang taruna tidak berhasil dikarenakan adanya sumbangan yang diberikan oleh pengusaha timah kepada organisasi karang taruna dan pemerintah Desa Q.

Langkah yang kemudian ditempuh adalah dengan memanfaatkan jaringan pertemanan yang dimilikinya. Hal ini memperlihatkan bahwa mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh Mas Deni mempergunakan jaringan informal melalui pertemanan. Hal ini sesuai dengan TMSD yang melihat bahwa struktur mobilisasi juga memasukkan posisi-posisi sosial dalam kehidupan sehari-hari dalam struktur mobilisasi mikro tujuannya adalah mencari lokasi-lokasi di masyarakat untuk dapat dimobilisasi (Situmorang, 2007, hlm. 7).

Untuk mencapai hal tersebut, Mas Deni kemudian mengajak salah seorang rekannya bernama Fajar yang merupakan warga Desa S dan berstatus sebagai mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Fajar juga seorang aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dikampusnya. Latar belakang yang

dimiliki Fajar tersebut mendorong langkah yang akan ditempuh Mas Deni dengan memanfaatkan jaringan pertemanannya guna membantu mengorganisir masyarakat kedalam kelompok gerakan sosial yang kemudian Mas Deni beri nama GSTAT. Menurut TMSD, Fajar inilah merupakan salah satu sumber daya potensial bagi awal kemunculan GSTAT. Pengalaman Fajar sebagai aktivis kampus merupakan kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam mengorganisir gerakan.

Taktik pertama yang dilakukan GSTAT adalah melakukan penyadaran khususnya kepada pemuda di Kecamatan Sekaran. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengikut serta tenaga kerja yang mendukung GSTAT. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara GSTAT tidak memiliki lokasi yang tetap sebagai tempat pertemuan. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya material sehingga GSTAT lebih banyak melakukan mobilisasi sumber daya ke tempat-tempat dimana pemuda sering berkumpul khususnya warung kopi. GSTAT memobilisasi dukungan warga dengan melakukan penyadaran kepada warga khususnya pemuda dengan menyebarkan ideologi gerakan yang diusung berupa masalah lingkungan dan kesehatan. Bagi GSTAT, kesadaran masyarakat akan dampak bahaya asap timah terhadap kesehatan perlu ditingkatkan.

Dari awal mula pengorganisasian masyarakat melalui GSTAT, pengorganisasian dilakukan oleh dua orang pemuda yaitu Mas Deni dan Fajar yang dalam konteks ini diklasifikasikan sebagai kaum profesional GSTAT. Mobilisasi sumber daya yang dilakukan GSTAT awalnya melalui jaringan kekerabatan serta melihat posisi sosial aktor sehingga mobilisasi dilakukan melalui kegiatan penyadaran dilakukan dengan mendatangi lokasi-lokasi yang berpotensi tempat berkumpulnya para pemuda di Kecamatan Sekaran khususnya warung kopi. Melalui gerakan tersebut, GSTAT mengklaim berhasil merekrut kurang lebih sekitar 200 orang simpatisan gerakan yang didominasi oleh pemuda.

Integrasi kelompok Gerakan Anti Pembakaran Timah

Terbentuknya organisasi gerakan anti pembakaran timah baik FKWTPT maupun GSTAT terjadi karena tersedianya sumber daya khususnya adanya pemimpin atau kaum profesional gerakan yang juga bertindak sebagai tenaga

kerja gerakan sehingga mampu mengorganisir masyarakat yang merasa terdampak asap timah kedalam organisasi gerakan. Lokasi Kecamatan Sekaran yang tidak begitu luas memungkinkan terjadinya pertemuan antar kelompok gerakan yang sudah terbangung. Proses Integrasi berawal ketika Mas Deni mengetahui adanya gerakan sosial yang juga dilakukan oleh kelompok lain melalui FKWTPT. Hal ini kemudian melihat kesempatan untuk menggabungkan diri sebagai satu kesatuan aksi karena melihat kesamaan visi dan ideologi yang diusung dari kedua elemen tersebut. Pada fase selanjutnya, aktor FKWTPT dan GSTAT akhirnya melakukan pertemuan guna menyatukan visi dan misi kedua kelompok gerakan tersebut.

Terintegrasinya FKWTPT dan GSTAT adalah bentuk dari penyatuan sumber daya dari kelompok gerakan yang ada di Kecamatan Sekaran. Selain itu, ideologi juga menjadi faktor penting dalam integrasi yang dibangun oleh kedua kelompok gerakan ini yang mana ideologi gerakan yang diusung oleh masing-masing kelompok gerakan memiliki kesamaan yaitu isu lingkungan dan kesehatan. Melalui integrasi ini pula terjadi pembagian peran dalam mengorganisir masing-masing kelompok gerakan yang diperlukan sebagai bagian dari taktik gerakan.

Pembagian tugas dan peran kelompok gerakan memperhatikan karakteristik capaian dan anggota yang terlibat didalamnya. Pada saat integrasi berlangsung, FKWTPT telah melakukan mobilisasi sumber daya melalui Komnas HAM. Sedangkan GSTAT telah memiliki sejumlah pengikut khususnya pemuda di Kecamatan Sekaran. Melihat posisi sumber daya strategis yang dimiliki masing-masing kelompok, akhirnya sepakat untuk melakukan pembagian tugas. FKWTPT melakukan mobilisasi gerakan pada struktur formal sedangkan GSTAT melakukan mobilisasi sumber daya yang berbasis massa atau informal.

D. STRATEGI DAN HAMBATAN GERAKAN ANTI PEMBAKARAN TIMAH

Pengaduan Masyarakat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Seperti uraian dalam TMSD, keberhasilan gerakan sosial tergantung dari ketersediaan sumber daya seperti tersedianya kelompok koalisi, adanya dukungan

dana serta mengelola dan memobilisasi sumber daya tersebut sesuai ideologi dan tujuan organisasi gerakan (Putra, 2006, hlm. 69-70). Untuk itu pemimpin memainkan peran penting agar pencapaian tujuan dapat diraih. Pada tahap ini pemimpin gerakan FKWTPT mencari celah untuk menuntaskan permasalahan ini tanpa perlu menurunkan massa guna mendesak pemerintah dan pengusaha untuk menuntaskan permasalahan asap timah ini.

Untuk memperkuat bukti keberatan warga atas aktivitas pembakaran timah aktor gerakan memobilisasi dukungan warga untuk mendapatkan tandatangan dan fotokopi KTP sebagai syarat kelengkapan pelaporan. Saat itu, desa yang menjadi basis penggalangan dukungan keberatan warga yaitu Desa X dan Y. Alasan pemilihan Desa X terkait dengan posisi Pak Imam sebagai kepala desa tersebut sehingga mobilisasi dukungan warga mudah untuk diperoleh. Hal ini kurang lebih sama dengan pemilihan Desa Y yang mana status Mas Huda sebagai *bayan* di desa tersebut.

Mobilisasi untuk memperkuat bukti keberatan warga juga dilakukan oleh aktor gerakan ke Desa Z dengan memanfaatkan jaringan pertemanan yang dimiliki Mas Huda. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Situmorang (2007) bahwa mobilisasi disini terjadi karena organisasi informal seperti jaringan kekerabatan dan persaudaraan menjadi dasar digunakan sebagai rekrutmen gerakan (hlm. 8). Mas Huda yang memiliki relasi pertemanan dijadikan sebagai pola rekrutmen gerakan untuk memberikan dukungan terhadap gerakan. Secara teknis mobilisasi sumber daya dilakukan mas huda dengan melakukan perjumpaan dengan salah satu teman yang dimilikinya di Desa Z sebut saja bernama Pak Burhan. Hasilnya dari rekrutmen tersebut warga Desa Z dapat dimobilisasi untuk memberikan dukungan dari gerakan yang dijalankan oleh FKWTPT.

Dalam melakukan serangkaian proses mobilisasi dengan wilayah yang telah ditentukan, ternyata dalam hal tersebut FKWTPT justru mendapatkan simpati dari beberapa warga diluar daerah sasaran mobilisasi. Sebut saja Mas Heri warga yang berasal dari Desa Q, Mas Heri bersimpati pada FKWTPT kerana merasakan dampak yang buruk dari asap timah terhadap dirinya dan keluarga. Untuk itu, Mas Heri kemudian menggabungkan diri ke FKWTPT. Bagi Mas Heri bergabungnya

dalam sebuah organisasi gerakan adalah mendapatkan kehidupan tanpa polusi asap timah. Posisi Mas Heri sebagai pedagang membuatnya mudah untuk melakukan komunikasi terhadap banyak kalangan sehingga memudahkan penyebaran ideologi gerakan. Mas Heri inilah yang kemudian turut andil sebagai profesional dan tenaga kerja gerakan dalam mengelola sumber-sumber daya untuk kepentingan gerakan.

Secara teknis rekrutmen dukungan terhadap gerakan FKWTPT telah memiliki pengikut dan simpatisan gerakan yang memberikan dukungan lewat tanda tangan yang menyatakan keberatan atas polusi asap timah. Dari hal tersebut inilah yang dijadikan dasar oleh para profesional gerakan sebagai modal untuk menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM. Dari pengaduan tersebut Komnas HAM melakukan kunjungan kerja dengan mendatangi langsung dan berdialog dengan warga Kecamatan Sekaran terkait polusi asap timah. Komnas HAM juga meninjau lokasi pembakaran timah dan melakukan mediasi antara pemerintah, pengusaha dan warga. Adapun hasil mediasi tersebut Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal antara lain:

1. Mendesak Kepada pengusaha industri pembakaran timah untuk segera melengkapi unit pengendali pencemaran udara (*Dust Collector*) dan unit pengendali pencemaran air atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), selambat-lambatnya Oktober 2013. Apabila dalam jangka waktu yang belum ditetapkan hal tersebut belum dilakukan, maka pemerintah Kabupaten Lamongan diminta agar segera menutup industri pembakaran timah tersebut.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri pembakaran timah aki bekas limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) untuk meminimalisir dampak lingkungan.
3. Melakukan moratorium pemberian izin kepada kegiatan industri pembakaran timah baru sampai adanya lokasi untuk industri pembakaran timah yang sesuai RTRW.
4. Segera merelokasi seluruh industri pembakaran timah yang berada di Kecamatan Pucuk atau wilayah lain ke wilayah yang jauh dari pemukiman masyarakat sesuai dengan RT/RW.

5. Memerintahkan aparat kepolisian untuk menjaga kondusifitas di lapangan.

Unjuk Rasa di Kantor Kecamatan Sekaran

Strategi yang digunakan oleh kelompok gerakan anti pembakaran timah berikutnya adalah melalui unjuk rasa. Masyarakat melakukan unjuk rasa dipicu karena ketidakpuasan masyarakat atas sikap pengusaha yang melanggar rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM. Pasca mediasi dengan Komnas HAM, segala aktivitas pembakaran timah harus dihentikan sebelum melengkapi dengan unit pengendali pencemaran udara (*dust collector*) maupun pencemaran air (IPAL) selambat-lambatnya Oktober 2013. Kekecewaan masyarakat juga bertambah seiring dengan tidak adanya langkah yang diambil pemerintah untuk menertibkan aktivitas pembakaran timah tersebut. Sedangkan, dalam poin-poin yang tertuang dalam rekomendasi tersebut salah satunya mendesak pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengambil langkah berupa penutupan jika tidak memenuhi poin yang telah ditentukan. Hal ini membuat masyarakat Sekaran semakin kecewa terkait sikap pemerintah yang abai terhadap kondisi lingkungannya.

Unjuk rasa ini merupakan sebuah strategi gerakan untuk mendesak agar pemerintah kecamatan Sekaran lebih memprioritaskan kondisi warga akibat pembakaran timah. Unjuk rasa ini merupakan salah satu teknis gerakan dimana masyarakat yang sebelumnya dimobilisasi dalam mendapatkan dukungan dari Komnas HAM kembali dimobilisasi untuk turun langsung ke jalan guna mendesak pemerintah Kecamatan Sekaran.

Saat agenda unjuk rasa diwacanakan, organisasi gerakan FKWTPT dan GSTAT telah mengintegrasikan kelompok mereka menjadi satu wadah gerakan yang tujuannya adalah menentang aktivitas pembakaran timah. Untuk mencapai tujuan ini, organisasi gerakan sosial harus mampu mengelola sumber-sumber yang telah tersedia. Sumber tersebut meliputi sumber material, seperti pekerjaan, penghasilan, dan tabungan serta sumber-sumber non-material seperti wewenang, komitmen moral, kepercayaan, persahabatan, kemampuan dan sebagainya (Sukmana, 2013, hlm. 45). Taktik pertama untuk menyelenggarakan kegiatan unjuk rasa dilakukan dengan menunjuk koordinator aksi yang tujuannya agar

unjuk rasa dapat berjalan dengan lancar dan tuntutan warga masyarakat Kecamatan Sekaran dapat dipenuhi. Dalam hal ini Fajar ditunjuk oleh Pak Imam sebagai koordinator lapangan. Alasannya, Fajar yang statusnya seorang aktivis kampus dipandang memiliki gudang pengetahuan dan kemampuan (*skills*) terkait dengan proses unjuk rasa.

Unjuk rasa memerlukan sumber daya berupa massa yang digerakkan sehingga diperlukan sosok pemimpin dan tenaga kerja gerakan yang mampu memobilisasi sumber daya tersebut. Terkait dengan hal tersebut McCarthy dan Zald (1979,1978) mengungkapkan bahwa sebuah organisasi gerakan dituntut untuk memiliki spesialisasi yang tinggi khususnya dalam mengelola sumber-sumber daya, merencanakan strategi, menghimpun dana, melakukan tekanan terhadap kelompok elit dan mengadakan kontak dengan media massa (Rusmanto, 2012, hlm. 35). Dalam kasus ini mobilisasi massa dilakukan oleh kaum profesional gerakan dengan kembali melakukan komunikasi terhadap warga yang sebelumnya dimobilisasi sebagai bentuk dukungan pengaduan ke Komnas HAM.

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, ada sejumlah penganut gerakan yang walaupun orang-orang tersebut tidak terlibat secara langsung dalam mengorganisir gerakan maupun terjun dalam sebuah aksi massa para penganut tersebut menyediakan sumber daya material misalnya uang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga pengunjung rasa dan alat peraga unjuk rasa. Hal tersebut menggambarkan bahwa konstituensi (Sumber dari Sumber daya), dan para pencari keuntungan yang untuk selanjutnya elemen ini dapat dimobilisasi dalam bentuk dan strategi gerakan sosial (Rusmanto, 2013, hlm. 66).

Teknis unjuk rasa dilakukan oleh masyarakat dengan mendatangi kantor Kecamatan Sekaran. Dalam unjuk rasa tersebut massa gabungan dari FKWTPT dan GSTAT melebur menjadi satu untuk menyuarakan keluhan dan tuntutan terhadap pemerintah kecamatan. Beberapa perwakilan dari pengunjuk rasa kemudian diterima oleh camat Sekaran untuk berdialog. Kesempatan ini digunakan oleh pemimpin gerakan untuk melakukan tekanan terhadap elit pemerintah kecamatan agar mau berperan pro-aktif dalam menuntaskan permasalahan asap timah. Adapun tuntutan warga terhadap pemerintah kecamatan adalah menutup lokasi pabrik timah karena tidak sesuai dengan Perda No.15 tahun

2011 tentang RT/RW. Dalam aturan yang tertuang dalam RT/RW tersebut, Kecamatan Pucuk dan Sekaran bukanlah kawasan yang diperuntukkan sebagai daerah industri besar. Untuk industri dengan skala besar daerah terletak di wilayah bagian utara kabupaten Lamongan sedangkan Kecamatan Sekaran tergolong dalam kawasan industri skala kecil dan menengah. Selain itu menurut para aktivis gerakan anti pembakaran timah, limbah hasil pembakaran timah mengandung limbah B3 dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, ayat 2 dan 3 tentang mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Aktor juga mendesak pemerintah Kecamatan menjadi pemimpin terdepan dan memfasilitasi audiensi ke bupati serta DPRD Lamongan. Aktor gerakan saat itu juga melakukan kontak dengan media massa untuk melakukan peliputan.

Unjuk rasa di Kantor kecamatan Sekaran juga pernah direncanakan untuk dilakukan kembali di Kantor Kecamatan Sekaran. Menurut para aktor gerakan anti pembakaran timah, penghargaan Adipura yang diterima oleh pemerintah tidak merepresentasikan kondisi lingkungan secara keseluruhnya dari kabupaten Lamongan khususnya Kecamatan Sekaran. Sebagai bentuk protes aktor FKWTPT mencoba untuk melakukan unjuk rasa yang tujuannya adalah menolak kirab Adipura di wilayah Kecamatan Sekaran.

Berdasarkan temuan tersebut kegagalan aksi pada tahap ini diakibatkan oleh singkatnya waktu mobilisasi sumber daya untuk menyelenggarakan aksi. Waktu untuk memobilisasi massa dan kebutuhan material gerakan terlalu singkat bagi pemimpin gerakan untuk mengkonsolidasikan massa agar mau bergabung. Selain itu, dari fenomena tersebut juga terlihat rasionalitas para anggota gerakan di mana lebih mementingkan untung rugi atau dalam fenomena ini keselamatan dan pekerjaan menjadi prioritas ketimbang mengikuti unjuk rasa. Hal ini sesuai dengan pernyataan McCarthy dan Zald (1977) tentang aspek kemunculan gerakan sosial yang mana gerakan sosial tidak lahir hanya karena adanya keluhan, tetapi pada aspek manfaat yang didapatkan jika gerakan sosial dilakukan (hlm. 1216).

Seminar Undang-Undang Desa dan Dampak Polusi Asap Timah

Dari gerakan yang pernah dilakukan mulai mediasi sampai unjuk rasa terdapat satu hal yang dirasa perlu dilakukan oleh profesional gerakan untuk lebih meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mendukung aksi

gerakan sosial tersebut. Adapun kegiatannya adalah berupa seminar dan sosialisasi tentang dampak polusi asap timah. Untuk menyelenggarakan sebuah seminar diperlukan sumber daya terutama materi agar seminar tersebut dapat terselenggara. Berdasarkan pandangan teori mobilisasi sumber daya, setiap organisasi gerakan harus mampu mengelola sumber daya yang tersedia dengan baik. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber material seperti pekerjaan (*jobs*), penghasilan (*income*), dan tabungan (*savings*), serta sumber nonmaterial lainnya (Sukmana, 2013, hlm. 45).

Pemenuhan kebutuhan akan sumberdaya dalam penyelenggaraan seminar undang-undang desa dan dampak polusi asap timah memanfaatkan dana bantuan dari anggota DPR RI yang saat itu kembali mencalonkan sebagai anggota DPR. Saat itu kegiatan seminar merupakan ide dari GSTAT yang melihat bahwa perlunya penyadaran kepada masyarakat terkait polusi asap timah yang mencemari kawasan Sekaran. Untuk mendapatkan dukungan massa agar hadir dalam kegiatan tersebut, Mas Deni kembali memobilisasi dukungan dengan mendatangi tempat-tempat berkumpulnya para warga dan pemuda. Sedangkan untuk menentukan lokasi GSTAT berkoordinasi dengan ketua FKWTPT. Penentuan lokasi akhirnya dilakukan di Balai Desa X dikarenakan Pak Imam merupakan kepala Desa X yang dapat menyediakan lokasi tersebut.

Mobilisasi sumber daya juga dilakukan dengan merekrut orang-orang yang berpotensi untuk dijadikan simpatisan gerakan. Untuk mendukung hal tersebut Mas Deni kembali melakukan mobilisasi pada tingkat mikro dimana mobilisasi tingkat mikro dilakukan dengan memasukkan serangkaian posisi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang tujuannya adalah mencari lokasi-lokasi di dalam masyarakat untuk dapat dimobilisasi (Situmorang, 2007, hlm. 7). Mobilisasi Mas Deni pada tingkat mikro kembali dilakukan dengan komunikasi kepada warga dan pemuda di tempat biasa warga berkumpul seperti warung kopi. Hanya saja sasaran mobilisasi pada tahap ini tidak hanya mencakup wilayah Kecamatan Sekaran tetapi mencoba diperluas hingga Kecamatan Maduran.

Saat kegiatan Seminar berlangsung, warga yang sebelumnya dimobilisasi akhirnya menghadiri kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut Fajar melakukan pemaparan terkait dampak yang ditimbulkan dari asap timah. Setelah itu, kegiatan

dilanjutkan dengan dialog dengan para peserta seminar untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dirasakan warga. Pak Muhajir seorang anggota DPR yang telah memberikan bantuan dana saat itu dijadwalkan hadir dalam sesi dialog terpaksa tidak dapat menghadiri karena adanya cuaca buruk sehingga penerbangan dari Jakarta ke Surabaya dibatalkan. Ditengah ketidakhadiran Pak Muhajir, Pak Imam sebagai pemimpin gerakan mencoba mengelola sumber daya agar massa yang telah terkumpul memiliki komitmen terhadap gerakan.

Setelah pemaparan dari warga selesai, Pak Imam sebagai pemimpin menginstruksikan kepada warga yang hadir dalam seminar tersebut untuk membentuk perwakilan dari desa-desa yang terdampak. Setelah itu, warga diminta untuk menyampaikan keluhan kepada Pak Imam jika sewaktu-waktu merasakan dampak dari polusi asap timah. Tujuan pelaporan ini bertujuan untuk dilaporkan ke Komnas HAM. Disinilah terlihat peran pemimpin gerakan dalam menterjemahkan alternatif solusi dan mobilisasi dukungan terhadap warga yang saat itu hadir.

Kurangnya koordinasi dan transparansi GSTAT dalam mengelola sumber dana yang diperoleh membuat kelompok FKWTPT kurang bersimpati atas kegiatan seminar ini. Selain itu, kegiatan yang mempergunakan arena politik sebagai sumber daya sebenarnya kurang dikehendaki oleh elit FKWTPT membuat agenda gerakan melalui seminar kurang mendapat dukungan dari simpatisan FKWTPT. Kondisi ini sesuai dengan pemikiran McCarthy dan Zald (1977) yang menyatakan bahwa bukan tidak mungkin terjadi perbedaan pandangan antara orang-orang yang terlibat didalam gerakan dan kepentingan diluar gerakan. Selain itu, taktik biasanya juga dipengaruhi oleh persaingan antar organisasi dan kerjasama (hlm. 1217). Perbedaan pandangan antar organisasi inilah yang menyebabkan keretakan hubungan antar organisasi gerakan sosial.

Walaupun terjadi perbedaan pandangan antar organisasi gerakan hal yang patut menjadi perhatian dalam gerakan sosial yang dilakukan melalui seminar undang-undang desa pertama adalah jumlah massa yang hadir dalam seminar merupakan “orang baru” yang sebelumnya belum pernah tergabung dan menyuarakan keluhannya dalam FKWTPT dan GSTAT. Kedua peserta seminar umumnya tidak hanya mencakup wilayah Kecamatan Sekaran tetapi Kecamatan

Maduran sehingga dari hal ini dapat diketahui bahwa dampak polusi asap timah tidak hanya berdampak di seputar wilayah Kecamatan Sekaran. Sehingga, hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah untuk segera mengambil langkah dalam menangani kasus polusi asap timah.

E. PERKEMBANGAN TERAKHIR KONDISI DI LAPANGAN

Forum Komunikasi Warga Tolak Pembakaran Timah (FKWTPT) secara resmi melakukan strategi gerakan sosial dengan mengirimkan pengaduan kepada beberapa lembaga pemerintah akhirnya mendapatkan respon khususnya Komnas HAM. Pada tahapan tersebut gerakan sosial berupa pengaduan ke Komnas HAM yang dilakukan oleh FKWTPT merupakan hasil dari akomodasi keluhan warga oleh para kaum profesional FKWTPT. Adapun keluhan warga terhadap aktivitas pembakaran timah dikarenakan hasil dari pembakaran tersebut mengkhawatirkan kesehatan dan terganggunya aktivitas warga khususnya pada malam hari.

Berdasarkan laporan warga tersebut, akhirnya kasus polusi asap timah yang meresahkan warga Kecamatan Sekaran ditindak lanjuti oleh Komnas HAM dengan melakukan kunjungan kerja secara langsung di wilayah Kecamatan Sekaran dan lokasi pembakaran timah di Kecamatan Pucuk. Dalam kunjungannya yang pertama, terdapat beberapa temuan komnas HAM tentang pelanggaran yang dilakukan pihak pengusaha dalam menjalankan industrinya. Adanya pelanggaran tersebut kemudian melahirkan rekomendasi yang ditujukan kepada pengusaha dan pemerintah guna menghilangkan polusi udara dari hasil pembakaran timah. Adapun rekomendasi tersebut telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya.

Rekomendasi Komnas HAM yang pertama ternyata tidak langsung diindahkan oleh pengusaha. Masyarakat yang tergabung dalam FKWTPT kemudian melayangkan laporan yang kedua kalinya kepada Komnas HAM. Untuk yang kedua kalinya pula, Komnas HAM melakukan kunjungan kerja di wilayah sekaran. dalam kunjungan kerja tersebut Komnas HAM juga mengagendakan rapat tertutup dengan Forum Pimpinan Daerah pada tanggal 16 Juni 2014. Hasil dari rapat tersebut adalah melakukan pembekuan terhadap seluruh kegiatan pembakaran timah di Kabupaten Lamongan sebelum melengkapi ketetapan yang ditentukan terhitung mulai tanggal 24 Juni 2014. Adapun ketentuan teknis yang dimaksud antara lain;

1. PP Nomor 18 tahun 1999 jo PP Nomor tentang pengelolaan limbah B3;
2. Permen Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata cara Pengelolaan Limbah B3;
3. Kep 03/BAPEDAL/09/1995/tentang persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3

Berdasarkan hasil uji laboratorium, dari 15 parameter ada satu parameter yang melebihi baku mutu yaitu partikulat debu yang mencapai 716 mg/nm³, atau melebihi baku mutu sebesar 350 mg/nm³ sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 10 tahun 2009. Ketentuan ini kemudian disepati oleh semua anggota yang hadir melalui penandatanganan bersama oleh seluruh Forum Pimpinan Daerah. Selanjutnya apabila pengusaha memenuhi sebagaimana ketentuan tersebut maka kegiatan pembakaran timah dapat dioperasikan kembali.

F. Kesimpulan

Gerakan anti pembakaran timah pada penelitian ini merupakan gerakan sosial yang dilakukan kelompok gerakan sosial masyarakat Kecamatan Sekaran dalam menentang aktivitas pembakaran timah di Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Pembakaran timah yang dilakukan oleh pengusaha timah di Kecamatan Pucuk menyebabkan polusi yang mengancam kesehatan dan akitivitas warga Kecamatan Sekaran khususnya pada malam hari. polusi yang disebabkan oleh asap timah tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan seolah dilakukan tanpa kontrol baik oleh pengusaha maupun pemerintah.

Di Kecamatan Sekaran terdapat dua kelompok masyarakat yang menentang aktivitas pembakaran timah. Pertama adalah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Warga Tolak Pembakaran Timah (FKWTPT) dan kedua adalah Gerakan Sehat Tanpa Asap Timah (GSTAT). Dalam menganalisa dinamika gerakan anti pembakaran timah ini, penulis menggunakan teori mobilisasi sumber daya khususnya yang dikemukakan oleh McCarthy dan Mayer Zald (1977). Teori tersebut memandang aktor yang terlibat dalam gerakan sosial memiliki rasionalitas yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum bergabung dalam gerakan sosial. Selain itu, rasionlitas aktor terlihat melalui pengorganisasian melalui kelompok-kelompok gerakan.

Kesuksesan dan kegagalan gerakan sosial ditentukan oleh tersedianya sumber-sumber daya, strategi dan taktik gerakan, kepemimpinan serta ideologi.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, gerakan sosial lahir melalui FKWTPT karena tersedianya sumber daya berupa masyarakat yang mencoba mengorganisir keluhan masyarakat menjadi organisasi gerakan. Beberapa masyarakat Kecamatan Sekaran memiliki ketersediaan waktu, tenaga dan materi untuk mengelola keluhan masyarakat menjadi organisasi gerakan. Selain itu, organisasi gerakan juga muncul melalui GSTAT. GSTAT memobilisasi dukungan khususnya peran pemuda di Kecamatan Sekaran untuk bergabung dalam organisasi tersebut. Munculnya kedua organisasi gerakan sosial pada awalnya tidak disadari antara satu dengan yang lain. Setelah terjadinya pertemuan kedua kelompok tersebut berintegrasi karena memiliki kesamaan ideologi yang diusung dalam masing-masing kelompok gerakan. Keberhasilan kedua kelompok tersebut berintegrasi dalam menentang aktivitas pembakaran timah tidak terlepas dari peran pemimpin. Pemimpin inilah yang turut memainkan taktik dan strategi gerakan bersama kaum profesional lainnya sehingga menentukan sukses atau tidaknya gerakan sosial.

Dilihat dari strategi yang digunakan, FKWTPT awalnya bergerak dalam struktur mobilisasi sumber daya melalui organisasi formal seperti Komnas HAM. Sebagai taktik agar Komnas HAM merespon keluhan masyarakat. Kaum profesional FKWTPT melakukan survei ke tiga desa yang terdampak polusi asap timah. Hasil dari sampling tersebut kemudian dijadikan sebagai alat bukti untuk bantuan pendampingan Komnas HAM.

Strategi berikutnya melalui unjuk rasa yang dilakukan di Kantor Kecamatan Sekaran. Dalam unjuk rasa ini massa yang sebelumnya dimobilisasi untuk kepentingan pelaporan ke Komnas HAM kembali diorganisir untuk melakukan tindakan kolektif berupa turun ke jalan dan berunjuk rasa. Dalam mengorganisir gerakan GSTAT berperan sebagai penggerak massa sedangkan FKWTPT melakukan tekanan ke pihak pemerintah Kecamatan untuk bekerja lebih pro aktif dalam menuntaskan permasalahan asap timah. Pada tahap ini sejumlah isu adanya massa tandingan dan peserta demo yang dibayar pihak pengusaha sehingga menyebabkan ketidak hadiran peserta unjuk rasa ke lokasi unjuk rasa menjadi penghambat proses gerakan sosial.

Sedangkan strategi terakhir adalah Seminar Undang-undang Desa dan Dampak Polusi Asap Timah. Gerakan sosial tersebut memfokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak dan bahaya asap timah. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat sadar akan bahaya asap timah dan mau bergabung dalam organisasi gerakan. Disini perbedaan pandangan atas taktik mobilisasi sumber daya yang digunakan oleh pemimpin masing-masing kelompok gerakan menjadi penghambat tujuan dari gerakan anti pembakaran timah.

Dari berbagai dinamika gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sekaran agar terbebas dari polusi asap timah. Pada akhirnya mendapatkan tanggapan dari Komnas HAM. Komnas HAM secara langsung meninjau kondisi lapangan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pengusaha untuk segera menghentikan kegiatan pembakaran timah sebelum melengkapi kegiatan usahanya dengan *dust collector* dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sampai penelitian ini ditulis pihak pengusaha telah menghentikan aktivitas pembakaran timah dan sedang dalam proses untuk melengkapi izin pengelolalan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Henslin, J.M. (2006). *Sosiologi dengan pendekatan membumi*, Edisi 6 Jilid 2. Jakarta : Erlangga.
- Rusmanto, J. (2013). *Gerakan sosial : Sejarah perkembangan teori antara kekuatan dan kelemahannya*. Palangkaraya : Zifatama.
- Situmorang, A.W. (2007). *Gerakan Sosial : Studi kasus beberapa perlawanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Stompzka, P. (2008). *Sosiologi perubahan sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Triwibowo, D. (2006). *Gerakan Sosial wahana civil society bagi demokratisasi*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Wictorowicz, Q (ed.). (2012). *Aktivisme Islam : Pendekatan teori gerakan sosial*. Jakarta : Yayasan Abad Demokrasi.
- Yin, R.K. (2013). *Studi kasus: Desain dan metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Bayuseno, P.A (2009). Evaluasi proses daur ulang sel accu bekas serta kualitas produk timbal. *Jurnal Rotasi* 10(1), dari <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/rotasi/article/viewFile/3713/3401>
- McCarthy, J.D. dan Zald, Mayer N. (1977). Resource mobilization and social movement : A partial theory. *American Journal of Sociology* 82 (6), 1212-1241 dari <http://www.uni-leipzig.de/~sozio/mitarbeiter/m29/content/dokumente/595/mccarthyzald77.pdf>
- Suharko. (2006). Gerakan sosial baru di Indonesia : Repertoar gerakan petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 10 (1), dari <http://jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/download/254/251>
- Sukmana, O. (2013). Konvergensi antara resource mobilization theory dan identity oriented theory dalam studi gerakan sosial baru. *Sosiologi Reflektif* 8 (1) dari <http://journal.uin-suka.ac.id/media/artikel/SR130801-Oman%20Sukmana.pdf>

Sumber Internet

Kabupaten Lamongan.(n.d) *Komnas HAM rekom tutup usaha pembakaran timah di Desa Warukulon* dari <http://lamongankab.go.id/instansi/pucuk/komnas-ham-rekom-tutup-usaha-pembakaran-timah-di-desa-warukulon/>,

Forum Warga Sekaran akan gelar seminar polusi asap timah (n.d) <http://www.kabarone.com/2014/02/forum-warga-sekaran-akan-gelar-seminar-polusi-asap-timah>